

85 EWS di Daerah Rawan Bencana

TEMANGGUNG (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung memasang 85 unit sistem peringatan dini atau *early warning system* (EWS) di sejumlah daerah rawan bencana di kabupaten tersebut. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Temanggung, Pria Andaka mengatakan pemasangan EWS diperlukan untuk memantau, mendeteksi dan memberikan peringatan dini bahaya longsor, juga untuk memantau curah hujan.

Disebutkan, EWS yang dipasang sejak 2016 hingga 2019 terbukti sangat bermanfaat bagi warga untuk mengurangi risiko kerugian korban jiwa, luka dan materi. "Sebanyak 85 unit EWS yang terpasang itu terdiri 82 unit dari pengadaan APBD Kabupaten Temanggung, 2 unit dari APBD Provinsi Jateng 2 unit, dan 1 unit dari APBN. Sejumlah EWS dipasang di daerah rawan bencana yang tersebar di 19 kecamatan," jelas Pria Andaka, Selasa (16/2). Diaku, ada beberapa EWS yang dilaporkan tidak berfungsi dengan baik, sehingga pihaknya akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui data pasti EWS tidak berfungsi. "EWS yang rusak akan diajukan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan. Selain perbaikan, akan ada tambahan pengadaan EWS karena daerah rawan bencana di Kabupaten Temanggung, terutama tanah longsor, saat ini cukup banyak," ungkap Pria Andaka. (Osy)

DI SMPN 1 BANJARNEGARA Diluncurkan Perpustakaan Online

BANJARNEGARA (KR) - SMPN 1 Banjarnegara meluncurkan perpustakaan online, Andipa Corner Pustaka Digital, untuk memberikan layanan perpustakaan kepada siswa. Fasilitas tersebut diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, Noor Tamami, Sabtu (13/2), disaksikan para siswa secara virtual.

Kepala SMPN 1 Banjarnegara, M Masduki Rahmat mengatakan, hadirnya Andipa Corner Pustaka Digital yang diinisiasi oleh Perpustakaan SMPN 1 Banjarnegara menjadi solusi di masa pandemi Covid-19. "Perpustakaan digital menjadi solusi bagi siswa untuk tetap hadir secara virtual dengan memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolah," jelasnya.

Menurut Masduki, untuk sementara layanan perpustakaan baru menyediakan beberapa buku fiksi dari penulis terkenal. Namun ke depan akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan para pembaca. Dengan adanya pustaka digital diharapkan kebutuhan buku para siswa tercukupi untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, Kepala Perpustakaan SMPN 1 Banjarnegara, Doko Harwanto menyatakan bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini pihaknya akan terus berupaya menumbuhkembangkan minat baca para siswa. "Perpustakaan digital mempermudah siswa untuk mendapatkan buku bacaan yang berkualitas dan bisa menambah minat baca anak-anak, yang muaranya menambah wawasan dan kecerdasan," ungkapnya. (Mad)

HUKUM

DIDUGA KORUPSI RP 851,86 JUTA Mantan Pegawai BKK Ditahan

BANJARNEGARA (KR) - Mantan Account Officer (AO) dana pada PT BKK Jawa Tengah Kantor Cabang Batur Banjarnegara, NH (28), ditahan oleh Kejaksaan Negeri Banjarnegara karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menggelapkan uang nasabah Rp 851,86 juta. Penahanan dilakukan Senin (15/2) untuk selama 20 hari ke depan.

Kasi Intel Kejari Banjarnegara, Yasozisokhi Zebua SH, Selasa (16/2) mengatakan perbuatan NH tak hanya merugikan nasabah tapi juga BKK Jateng, karena dana nasabah tersebut berada dalam pengelolaan BKK sehingga menjadi kerugian keuangan bagi BKK. Kerugian keuangan yang diderita oleh BKK tersebut juga menjadi kerugian keuangan bagi pemerintah daerah.

Zebua menjelaskan, NH melakukan perbuatannya secara berturut-turut dan

berlanjut antara tahun 2018 hingga 2020. "Ya bertugas mengambil setoran tabungan dari nasabah, tapi tidak disetorkan ke bank melalui sistem. Selain itu, tersangka menarik tunai atas nama nasabah tanpa sepengetahuan pemilik rekening."

"Juga ada bukti slip penarikan nasabah hanya mengisi kolom tanda tangan, tapi nilai nominal penarikan kosong. Dari hasil audit BPKP, perbuatan NH menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 851,86 juta," ujarnya.

Sedangkan Kasi Pidsus Kejari Banjarnegara, Amir Akbar Nurul Qomar, menambahkan tersangka NH ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 15 Februari 2021 di Rutan Banjarnegara. Tersangka diancam pidana minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun sebagaimana diatur pada pasal 2, pasal 3 atau pasal 8 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (Mad)

Berbekal Korset, Pencuri Beraksi di Mal

SLEMAN (KR) - Empat kawanan pencuri spesialis pusat perbelanjaan, digulung saat akan beraksi yang kedua kalinya di wilayah Sleman. Modusnya, para pelaku menggunakan korset untuk memasukkan beberapa potong celana yang dicuri.

Kapolsek Sleman Kopol Irwiantoro didampingi Kanit Reskrim Iptu Eko Haryanto, Selasa (16/2), mengungkapkan keempat pelaku yakni MF (23) warga Wonogiri, AT (39) dan PD (33) warga Jateng dan MK (23) asal Kudus. "Kawanan pelaku ditangkap saat akan beraksi lagi di lokasi yang sama. Mereka dulu pengamen, kemudian sepakat melakukan kejahatan," ungkap Kapolsek.

Dijelaskan, terungkapnya kasus itu di-

awali laporan pencurian karyawan toko di sebuah pusat perbelanjaan, Kamis (28/1) pukul 12.00. Setelah mendapat laporan, petugas piket Reskrim mendatangi dan melakukan olah TKP serta melakukan penyelidikan dan melakukan pengamatan CCTV di dalam toko serta parkir pusat perbelanjaan.

Dari ciri yang didapatkan, petugas melakukan penyergangan bekerjasama dengan sekuriti setempat. Kemudian Kamis (11/2) pukul 14.00, mobil yang dicurigai masuk parkir. Setelah dipantau melalui kamera CCTV, ternyata mereka akan melakukan pencurian lagi sehingga langsung diamankan.

"Kepada petugas, pelaku mengakui sebelumnya sudah melakukan pencurian di lokasi yang sama dengan modus yang sama. Mereka mencuri enam potong celana panjang dengan cara dimasukkan ke dalam korset. Dari enam potong yang dicuri, kami menyita empat potong karena lainnya sudah dijual," tambah Iptu Eko.

Salah satu tersangka mengatakan, ide menggunakan korset dari temannya yang juga pengamen. "Saya diajari teman dan sengaja menyasar pusat perbelanjaan karena oleh teman diajarkan untuk beraksi di tempat itu," pungkasnya. (Ayu)



KR-Wahyu Priyanti

Keempat pelaku diamankan dengan barang bukti curian.

PENULARAN COVID-19 MENURUN

Wonosobo Menuju Zona Hijau

WONOSOBO (KR) - Penularan virus korona (Covid-19) di Kabupaten Wonosobo terus mengalami penurunan dan cenderung melemah. Bahkan kasus aktif positif kini tinggal menyisakan 207 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, di ruang isolasi, maupun isolasi mandiri.

Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Wonosobo, hingga Selasa (16/2) lalu virus korona telah menjangkiti 4.869 warga. Dari jumlah akumulatif positif Covid-19 4.869 kasus, sebanyak 4.395 di antaranya telah dinyatakan sembuh, 207 orang masih dalam perawatan dan isolasi, serta 268 kasus kematian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Wonosobo, One Andang

Wardoyo mengatakan, berbagai upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 terus dilakukan. Termasuk mulai melaksanakan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sehingga mampu mengakses informasi penetapan zonasi hingga skala RT dan RW di tingkat wilayah. "Melihat potensi penularan kasus Covid-19 yang cenderung melemah, kami yakin dengan mengintensifkan PPKM skala mikro yang diberlakukan 9-22 Februari, Wonosobo akan segera kembali menuju daerah zona hijau," ungkapnya.

Pelaksanaan PPKM Mikro, jelas Andang, dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan berbagai fakta realitas yang terjadi di lapangan, mulai dari laju

kematian, tingkat kesembuhan, serta melihat potensi penularan dan kasus aktif Covid-19 yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sejauh ini pihaknya telah memerintahkan Camat se-Wonosobo agar terus mengintensifkan pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah masing-masing. Termasuk memastikan para kepala desa (kades) dan lurah untuk melaksanakan penetapan zonasi skala mikro hingga tingkat RT dan RW, berikut skenario pengendalian penanganan dan pencegahan penularan Covid-19.

"Terpenting adalah memastikan adanya Posko Tingkat Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi sentral tingkat desa dalam melakukan penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Keberadaan Posko Desa ju-

ga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi dan pembinaan masyarakat, termasuk memberikan berbagai dukungan terkait," tandas Sekda.

Dandim 0707 Wonosobo

Letkol Czi Wiwid Wahyu Hidayat menambahkan, pemberlakuan PPKM skala mikro ini dilakukan secara menyeluruh baik di Jawa Tengah hingga tingkat nasional. (Art)



KR-Ariswanto

Tim gabungan TNI-Polri terus melakukan operasi dan sosialisasi penegakan protokol kesehatan di Wonosobo.

MASA JABATAN AKAN BERAKHIR 17 FEBRUARI 2021

Rudy Tetap Perjuangkan Underpass Gilingan

SOLO (KR) - Menjelang akhir masa jabatan sebagai Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo masih memperjuangkan pembangunan *underpass* gilingan dan Palang Joglo yang selama ini sering menjadi titik kemacetan.

Bahkan walikota yang akan mengakhiri masa jabatan pada Rabu (17/2), mengusulkan model *elevated rail*, yang dinilai lebih ekonomis sebab tidak harus disertai pembebasan lahan.

Sepekan lalu, ketika bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saya mengusulkan pembangunan dua infrastruktur pada perlintasan sebidang kereta api, menyusul dua bangunan sejenis. Masing-masing *overpass* Manahan dan Purwosari. "Untuk *underpasselevated*

rail atau jalan kereta api dinaikkan minimal 4,8 meter sehingga berada di atas jalan raya yang ada saat ini," ungkap Hadi Rudyatmo menjawab wartawan di Balai kota, Selasa (15/2).

Menurutnya, biaya pembangunan *underpass* model *elevated rail* jauh lebih murah dibanding model *overpass* seperti Purwosari dan Manahan. "Pembangunan *overpass* Palang Joglo, harus diikuti dengan pembebasan tanah sangat luas, termasuk Pasar Kadipiro tak tersisa lagi, sebagian

kantor Kelurahan Kadipiro dan sebagian kampus Universitas Slamet Riyadi, serta beberapa bidang tanah yang lain lagi," jelasnya.

Dikatakan, biaya pembebasan tanah sering kali jauh lebih besar daripada dana pembangunan konstruksi jembatan itu sendiri. Seperti halnya *overpass* Purwosari, idealnya berbentuk huruf Y, namun akhirnya harus direalisasikan dengan bentuk huruf I, karena biaya pembebasan akibat terkena proyek sangat besar. "Karenanya, untuk *underpass* Gilingan dan palang Joglo, kami usulkan model *elevated rail*, daan nanti naiknya bisa mulai dari Stasiun Solo Balapan," tandas Rudyatmo.

Dari hasil pembicaraan dengan beberapa pemangku kepentingan di pemerintah pusat, lanjut Rudy,

kemungkinan usulan tersebut dapat direalisasikan pada akhir 2021 atau awal 2022. Jika dua infrastruktur itu telah terbangun, akan mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Solo, terutama di kawasan perlintasan sebidang kereta api.

Diungkapkan pula, seluruh biaya pembangunan akan ditanggung pemerintah pusat. Dia berharap, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang akan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Solo dapat mengawal program tersebut hingga terrealisasi. "Saat ini, pemerintah pusat sedang mempersiapkan proses lelang, dan jika semua berjalan lancar, pembangunan apat dimulai pada akhir 2021 atau awal 2022," tambah Hadi Rudyatmo. (Hut)

Pembunuh Satu Keluarga Divonis Mati

SUKOHARJO (KR) - Terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Desa Duwet Baki, Henry Taryatmo (41), divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo yang diketuai Bukhori Tampubolon SH.

Dalam persidangan, terdakwa terbukti melakukan pembunuhan terhadap empat orang dan menguasai harta korban. Keempat korban satu keluarga yakni Suranto (42), Sri Handayani (36), Rafael (10) dan Dinar (5).

Pejabat Humas PN Sukoharjo Saiman mengatakan, sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus pembunuhan satu keluarga tersebut digelar di PN Sukoharjo pada Senin

(15/2). Vonis dijatuhkan majelis hakim berdasarkan keterangan enam orang saksi, saksi ahli dan fakta di persidangan. Selain itu juga diperkuat dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

"Terdakwa mengakui perbuatannya membunuh empat orang satu keluarga sehingga memutus garis keturunan korban. Hal ini menjadi pertimbangan majelis hakim menjatuhkan hukuman mati," ujarnya.

Dalam persidangan juga terungkap tidak ada yang meringankan terdakwa. Selain membunuh empat orang dalam satu keluarga, terdakwa juga menguasai harta korban.

Sebelumnya, keluarga korban kasus pembunuhan satu keluarga warga Dukuh Slemben RT 01 RW 05, Desa Duwet, Kecamatan Baki mendampingi kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo menyampaikan aspirasi pada Jaksa Penuntut Umum Kamis (14/1). Keluarga korban meminta terdakwa pembunuhan Henry Taryatmo (41) warga Kecamatan Baki dituntut dengan hukuman maksimal, yakni hukuman mati. (Mam)

6 PELAKU BERHASIL DIAMANKAN

Polairud Bongkar Perniagaan Satwa Dilindungi

BANTUL (KR) - Petugas Polairud Polda DIY berhasil membongkar jaringan perniagaan dan kepemilikan satwa dilindungi, berupa jenis buaya muara (*crocodylus poros*) dan kura-kura moncong babi (*carettochelys insculpta*).

Sekarang 6 pelaku dan barang bukti 6 buaya muara serta 14 anak kura-kura moncong babi diamankan di Mako Ditpolairud Polda DIY Depok Parangtritis. Tapi untuk menjaga keselamatan semua barang bukti siang kemarin dibawa ke Balai Konservasi Satwa di Malang Jawa Timur.

Wadir Ditpolairud Polda DIY, AKBP Azhari Juanda SIK didampingi Wakil Kabid Binmas Polda DIY AKBP Verena, Jaksa dari Kejati DIY Nurul F Damayanti SH MH dan Kepala BPSDA M Wahyudi SP MSI ketika memberi keterangan pers di Mako Ditpolairud, Selasa (16/2), menjelaskan terbongkarnya perniagaan dan kepemilikan buaya dan kura-kura yang dilindungi undang-undang tersebut

berkat pelacakan ciber petugas Polairud. "Karena jual beli buaya tersebut dilakukan oleh para pelaku melalui *online*," jelas AKBP Azhari.

Wadir Ditpolairud mengungkapkan 6 pelaku kasus tersebut antara lain RRL (17) warga Kasihan Bantul dan RR (17) warga Sabdadadi Bantul. Karena keduanya masih dibawah

umur, perkaranya diselesaikan melalui sidang diversi dan dimintakan penetapan ke Ketua PN Bantul sesuai peradilan pidana anak.

Pelaku lainnya, RCH (25) warga Kasihan, RJD (24) warga Melati Sleman dan EKS (28) warga Pleret Bantul, ketiganya tersangka memelihara buaya. Sedangkan RYS (28) warga

Triharjo Sleman sebagai tersangka pemelihara kura-kura moncong babi.

AKBP Azhari berharap, pengungkapan kasus perniagaan satwa dilindungi ini juga sebagai edukasi kepada masyarakat, bahwa menjualbelikan dan memelihara satwa dilindungi itu dilarang pemerintah dan dapat dipidanakan. (Jdm)



KR-Judiman

Wadir Ditpolairud dan petugas Polda DIY, Kejati dan BPSDA saat memberi keterangan pers.